

STUDI OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN LEMBANG (*THE OPTIMIZATION STUDY OF GOOD GOVERNANCE in LEMBANG*)

Rino Adibowo, Selfa Septiani Aulia, Zalfa Nafisa Alfiyah Mudakir, Gilang Muhamad Faris
Ilmu Pemerintahan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipatiukur No. 112-116, Kota Bandung, Kode Pos 40132, Indonesia

E-mail :

rino.adibowo@email.unikom.ac.id

Abstract

Good governance is an implementation of solid and responsible development management that is in line with the principles of democracy with an efficient market, avoidance of misallocation of investment funds, and prevention of corruption both politically and administratively. Good governance is a concept that is widely discussed in political science and public administration, especially in relation to democracy, civil society, people's participation, human rights, and sustainable community development. In practice, good governance is a form of state and community management that relies on the interests of the people.

The Lembang District is included in the agropolitan area and also urban tourism because it has the potential to develop the local economy which can help PAD (The Local Own-source Revenue) the local government of west Bandung. These potentials such as agriculture, plantations, animal husbandry and tourism, both natural and artificial tourism. The Lembang District has a fairly high agricultural sector, especially in vegetable commodities, where vegetable production in Lembang District has been exported to several countries and 70% supports Jakarta retailers, agriculture is spread in almost all villages in Lembang District.

The research problem in Lembang District is regarding Disaster Prone. Lembang is one of the sub-districts that is included in the Lembang fault line which starts from Padalarang sub-district to Jatinangor which has a distance of about 29 KM. when viewed from the condition of the soil in the Lembang sub-district, it has loose soil which causes many landslides due to slope instability. This research is important to do to see how to optimize governance in Lembang District, especially in the agricultural and tourism sectors. The optimization study was identified based on the Regional Regulation of West Bandung Regency Number 4 of 2012 concerning the West Bandung Regency Tourism Development Master Plan. This research is expected to provide benefits and new knowledge regarding optimizing governance in Lembang District.

Keywords: Good Governance, The Optimization, Urban Planning, [Autonomous Region](#).

Abstrak

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.

Kecamatan lembang termasuk kedalam daerah kawasan agropolitan dan juga urban tourism karena memiliki potensi mengembangkan perekonomian lokal yang dapat membantu PAD Kabupaten Bandung Barat. Potensi – potensi tersebut seperti pertanian, perkebunan, peternakan serta pariwisata baik itu wisata alam maupun buatan. Kecamatan Lembang memiliki sektor pertanian yang cukup tinggi khususnya dalam komoditas sayuran, dimana hasil produksi sayuran di Kecamatan Lembang sudah di Ekspor ke beberapa negara dan 70% menumpang ritel-ritel Jakarta, pertanian tersebut tersebar di hampir seluruh Desa Kecamatan Lembang.

Permasalahan di Kecamatan Lembang yang sangat amat umum yaitu mengenai Rawan Bencana. Lembang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk pada jalur sesar lembang yang dimulai dari kecamatan padalarang hingga jatinangor yang memiliki jarak sekitar 29 KM. jika dilihat dari kondisi tanah di kecamatan lembang memiliki tanah yang gembur sehingga banyak mengakibatkan longsor dikarenakan ketidak stabilan lereng, untuk mengurangi hal tersebut maka diberlakukannya reboisasi atau penanaman kembali pohon dan tidak lagi mengalih fungsi lahan sembarangan. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana optimalisasi tata Kelola pemerintahan di Kecamatan Lembang, terutama pada sektor pertanian dan pariwisata. Studi optimalisasi diidentifikasi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru mengenai optimalisasi tata kelola pemerintahan di Kecamatan Lembang.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Optimalisasi, Perencanaan Kota, Otonomi Daerah.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 jumlah kabupaten/kota di Indonesia sudah bertambah 183 daerah mekaran yang terdiri dari 151 Kabupaten dan 32 Kota. Pemekaran daerah menurut Makaganza. 2008:17 diperhalus dari bahasa eupheisme yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” dari satu wilayah untuk membentuk sebuah unit administrasi lokal baru. Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 8 berbunyi bahwa pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan. Sehingga dalam wacana pemekaran kota Lembang ini mengikutsertakan 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong. Upaya pembentukan Kota Lembang ditandai dengan dikeluarkannya surat bernomor 001/IST-KPBU/II-K/2022 oleh Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU (Kawasan Bandung Utara) yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat (Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU, 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029 menjelaskan fungsi kecamatan Lembang sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yang diperuntukan untuk pengembangan pusat pelayanan beberapa

kecamatan, sebagai Kawasan budaya, wisata, perekonomian skala lokal, Pendidikan, Kesehatan dan peribadatan. Fungsi Kawasan Kecamatan Parongpong sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yaitu PPL diperuntukan untuk pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani pusat kegiatan antar desa. Fungsi Kawasan Kecamatan Cisarua sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Hal yang mendasari mengapa 3 kecamatan ini yang dipilih untuk membentuk suatu daerah otonom baru karena kondisi geografis ketiga daerah tersebut yang berdekatan sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan.

Sejak ditetapkan Bandung Barat sebagai Daerah ke 26 di Jawa Barat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan dari pemekaran Daerah tersebut dari Kabupaten Bandung sebagai daerah induknya menjadi perhatian yang luas dari berbagai kalangan. Heterogenitas wilayah menjadi variable kajian terhadap terhadap perencanaan wilayah yang ditujukan dengan maksud pembentukan Bandung Barat yaitu mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Begitu pula halnya Lembang, sebagai salah satu wilayah administrasi

Kecamatan dari 16 Kecamatan di Bandung Barat yang memiliki kekhasan tersendiri. Secara historis wilayah ini merupakan kawasan budaya, wisata, perekonomian skala lokal, pendidikan yang terus berkembang sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai kalangan.

Pemerintah Daerah yang diberikan mandat untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam mengembangkan Kecamatan Lembang. Isu-isu strategis wilayah ini perlu diidentifikasi secara cermat sehingga pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan yang akurat dan komprehensif baik dari sisi anggaran, penguatan organisasi pemerintah, sarana dan prasarana, dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang tersebut maka dapat dirumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan inovasi dalam tatakelola pemerintahan sehingga maksud dari pembentukan Bandung Barat dapat terwujud.

a. Rumusan Masalah

Bagaimana optimalisasi tata kelola pemerintahan di kecamatan lembang berdasarkan kriteria-kriteria tata kelola pemerintahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk mencapai tujuan akhir dalam penelitian, maka terdapat beberapa maksud dan tujuan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Identifikasi potensi, masalah dan isu terkait kewilayahan di Kecamatan Lembang
2. Identifikasi tata kelola yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah dan isu serta mengembangkan potensi kewilayahan di Kecamatan Lembang.
3. Optimasi Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah atau Dinas terkait mengenai tata kelola pemerintah Kecamatan Lembang.
- 2) Sebagai bahan studi lanjutan bagi Dosen dan Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian ini.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Pemerintahan

Pemerintahan secara etimologis berasal dari kata Yunani, 'kubernan' atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan (Surbakti, 2002; 167). Sedangkan pendapat lain, mengatakan pemerintahan dari kata 'perintah'. Kata perintah memiliki empat unsur yaitu pertama, ada dua pihak yang saling terkait. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Martini dan Juwono, 2015: 17). Dari istilah tersebut, bahwa pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan. Pemerintah selalu di orientasikan pada kemajuan sebuah bangsa-negara.

Mac Iver mengartikan Pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan peran dan fungsi negara (Agustino, 2011:8). Iver seakan-akan menyamakan antara negara dan pemerintah. Padahal dal ilmu politik klasik dijelaskan bahwa ruang lingkup negara jauh lebih luas dari pada pemerintah. Negara itu terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah, dan kedaulatan (Rodee dkk, 2000:46-49). Penjelasan ini secara konseptual memang

demikian, namun dalam praktiknya seringkali negara dan pemerintah disamakan dalam tatam kelola pemerintahan. Pemahaman ini yang terlihat dari sebuah gagasan Iver tentang pemerintahan. Sedangkan ilmuwan politik, Roy C Macridis dan Bernard E Brown sebagaimana dikutip Muhtar Haboddin (2015:1) mengartikan pemerintahan adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. Karena itu tugas pemerintahan ialah mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

Pemerintah adalah solusi karena itu eksistensi pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi negara-negara sosialis sudah tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar sekali dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pensiunan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, hingga menjamin ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini tidak dapat digantikan oleh institusi apapun, termasuk pasar dan masyarakat sipil (Haboddin, 2015:1).

2.2 Fungsi Pemerintahan

Penelitian dan penulisan tentang fungsi pemerintah semakin banyak diminati oleh ilmuwan sosial, politik, dan pemerintahan. Hasil penelusuran berbagai literature menyuguhkan fakta baru bahwa kajian

mengenai fungsi pemerintahan semakin banyak ditekuni. Untuk keperluan itu, maka terdapat beberapa pendapat tentang fungsi pemerintah. Pakar pemerintahan Ryaas Rasyid dalam Makna Pemerintahan membagi tujuh fungsi pokok pemerintahan. Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, memelihara keterlibatan dengan terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun melatarbelakangi perbedaan mereka. Jaminan keadilan ini terus terjamin melalui keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak serta dimana perselisihan dapat didamaikan.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintahan. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantut orang miskin dan

menyantuni anak cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan sejenisnya. Keenam, menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja yang secara langsung dapat menjamin peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan negara. Ketujuh, menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi (Rasyid, 1997:12-13).

2.3 Tata Kelola Pemerintahan

Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan) merupakan kata yang sering diucapkan dalam berbagai ruang diskusi di Indonesia seperti demokrasi dan otonomi. Istilah *Governance* banyak yang menerjemahkannya menjadi tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan (manajemen). *Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan

pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Beama, Chandra Johanis Putra, et al. dalam *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3.6 (2022): 3695-3708 bahwa, Dalam proses demokratisasi, good governancesering mengilhamipara aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Hal ini bukan hanya memungkinkan adanya check and balance, tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Desentralisasi sebagai salah satu asas otonomi daerah, hal ini diimplementasikan untuk aplikasi demokratisasi di Indonesia (Sulila, 2015).

Transformasi desain tata Kelola pemerintahan dari sentralisasi yang sangat berdampak terhadap tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat memunculkan potensi di daerah yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Asas desentralisasi dilaksanakan menjadi jawaban dengan tujuan

terciptanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya daerah bisa menggali sebesar-besarnya potensi yang dimiliki. Ditetapkannya Undang-Undang No.23 tahun2014 tentang.Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun2004 tentang.Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah membuka peluang adanya reformasi yang dijalankan oleh setiap daerah agar dapat melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan pembangunan (Rante, Mire, & Paminto, 2018). Setiap daerah tersebut memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan (Sidik, 2002).

Berdasarkan kutipan dari Kadarisman, Ade, and Ilham Gemiharto dalam Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam

Demokrasi 5.1 (2017), bahwa Tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan sejumlah ciri utama, diantaranya yang terpenting adalah : desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Peran serta masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kontrol guna meningkatkan citra pemerintahan yang transparan.

Terkait Tata kelola pemerintahan di Kecamatan Lembang, maka pemahaman terhadap aspek perencanaan kota sangat penting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perencanaan kota merupakan perencanaan fisik yang terintegrasi dengan aspek sosial-budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan Kecamatan Lembang terkait dengan “Manajemen Kawasan Perkotaan” menjadi penting, mengingat Kecamatan Lembang merupakan bagian Kawasan Perkotaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Manajemen perkotaan adalah suatu upaya untuk mobilisasi sumber daya perkotaan, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian, secara efisien dan efektif guna mewujudkan visi, misi dan tujuan dari suatu kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lingkungan strategis (Van Dijk, 2006). Manajemen Kawasan Perkotaan merupakan gambaran dari perilaku/ sikap/

tindakan/ administrasi pemerintah kota dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemerintahan. Manajemen kota harus mendukung dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Adapun prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam rangka mewujudkan manajemen perkotaan antara lain:

- Peran serta setiap warga negara kota
- Penegakan hukum, dengan kerangka hukum yang adil
- Keterbukaan (transparansi), kebebasan hak dan tanggung jawab perwujudan informasi yang terbuka
- Ketanggapan (peka), seluruh lembaga pemerintahan menyelenggarakan tugas/fungsinya untuk memuaskan semua pihak terkait
- Keadilan: setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam memelihara, mengembangkan hidup dan kehidupannya
- Efektivitas dan efisiensi, lembaga-lembaga bersama masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan dapat melakukan secara efisien dan efektif
- Akuntabilitas

- Visi: pemimpin masyarakat memiliki pandangan yang luas
- Keterjangkauan: setiap warga berhak dapat menjangkau setiap proses kebijakan.

Seperti yang disampaikan oleh Hajar, Siti, Khaidir Ali, and Agung Saputra melalui Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora 6.1 (2021): 136-142, bahwa Pemerintahan desa mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan yang dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif,

terbuka serta bertanggungjawab. Optimalisasi pelayanan publik juga dilaksanakan oleh pemerintahan desa Pematang Johar dalam tata kelola pemerintahannya.

Oleh karena itu pemerintah memiliki peranan yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan wujud pelayanan yang berkualitas.

2.4 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yaitu bertujuan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena

pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang di berikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 memberikan definisi bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

2.5 Perencanaan Kota

Pengertian perencanaan dalam ranah kebijakan dapat dilihat tertuang dalam PP No 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan berfungsi perkotaan.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Utoyo, Bambang melalui Jurnal Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, bahwa Perencanaan tata ruang kota sebagai bagian dari kegiatan perencanaan tata ruang sebenarnya adalah bentuk rumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan ruang kota. Langkah yang diambil oleh pelaku kebijakan dalam proses perumusan kebijakan publik akan sangat ditentukan oleh perspektif yang digunakan. Tata kelola sebagai perspektif utama dalam administrasi publik dan manajemen menuntut penerapan prinsip-prinsip yang dikaitkan dengannya untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Perencanaan kota merupakan perencanaan fisik yang terintegrasi karena perencanaan kota memiliki aspek sosial budaya, ekonomi dan politik yang sangat kompleks dalam suatu wilayah fisik (ruang kota). Dengan demikian, perencanaan kota adalah perencanaan yang dibuat dalam kerangka pengaturan penggunaan ruang kota, termasuk pertanyaan tentang kebutuhan atau kepentingan yang saling bergantung dalam penggunaan sumber daya yang sangat terbatas. Serta keterkaitan

antara suatu kawasan peruntukan dengan kawasan peruntukan lainnya berdasarkan kapasitas infrastruktur peruntukan peruntukan kawasan tersebut. Perencanaan terkait dengan objek yang direncanakan dengan domain publik; bahwa perencanaan adalah proses multidisiplin, terpadu dan sistematis (menggunakan metode tertentu); Perencanaan meliputi tujuan, kebijakan, rencana, prosedur, dan program. Kebijakan perencanaan mengenai peruntukan ruang kota (lahan) akan berimplikasi pada perencanaan kota. Keputusan perencanaan akan memiliki dampak yang sangat kuat terhadap lanskap fisik secara keseluruhan, sehingga pemilihan bentuk rencana harus melalui pertimbangan global.

Perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan antara berbagai alternatif yang ada. Namun keduanya juga menulis bahwa meskipun perencanaan itu dilaksanakan oleh setiap orang, akan tetapi perencanaan kota sangat berbeda dengan bentuk perencanaan lainnya dalam berbagai aspek yang penting, yaitu:

1. Perencanaan kota berkaitan erat dengan masalah – masalah kemasyarakatan yang di dalam nya tercakup sekelompok besar

klien yang mempunyai kepentingan berbeda beda.

2. Perencanaan kota merupakan aktifitas yang benar – benar direncanakan dengan matang yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara profesional sebagai perencana.
3. Tujuan dan sasarannya, serta pranata pranata untuk mencapainya, sering teramat tidak pasti.
4. Para perencana kota sendiri jarang membuat keputusan, malahan sebaliknya, mereka membuat alternatif dan rekomendasi bagi pihak pihak yang dipilih dan ditunjuk untuk mengambil keputusan keputusan tertentu.
5. Para perencana kota menggunakan berbagai alat bantu dan metode – metode khusus untuk menganalisis dan menyajikan berbagai alternatif.
6. Hasil dari sebagian besar kegiatan perencanaan hanya terlihat 5-20 tahun setelah keputusan dibuat, membuat umpan balik dan tindakan korektif menjadi sulit.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Kustiwan, Iwan, and Afrizal Ramadhan melalui Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, yaitu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terdapat cita-cita untuk mewujudkan kota-kota dan permukiman yang aman, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan (Tujuan-11).

Dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan, semua warga memiliki hak atas kota, khususnya dalam konteks persoalan kebutuhan hunian sebagai salah satu kebutuhan primer yang perlu ditangani dan diprioritaskan.

Terkait Tata kelola pemerintahan di Kecamatan Lembang maka pemahaman terhadap aspek perencanaan kota sangat penting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perencanaan kota merupakan perencanaan fisik yang terintegrasi dengan aspek sosial-budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pertimbangan yang digunakan sebagai prasyarat atau kriteria-kriteria pemekaran wilayah pun berkaitan dengan aspek wilayah geografis, demografi, sosial-politik, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah merupakan kriteria dalam pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undnag No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun parameter dari setiap kriteria adalah sebagai berikut:

a) Kriteria Persyaratan Dasar

Kewilayahan

- ✓ Parameter Luas Wilayah Minimal
- ✓ Parameter Jumlah Penduduk Minimal

- ✓ Parameter Kejelasan Batas Administratif
 - ✓ Parameter Cakupan Wilayah
 - ✓ Parameter Batas Usia Minimal Kecamatan
- b) Kriteria Persyaratan Dasar Kapasitas
- ✓ Parameter Geografi
 - ✓ Parameter Demografi
 - ✓ Parameter Keamanan
 - ✓ Parameter Sosial Politik (partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum)
 - ✓ Parameter Potensi Ekonomi Daerah
 - ✓ Parameter Keuangan Daerah
 - ✓ Parameter Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan

Berikut ini Gambar 1. Diagram Alur Penelitian yang merupakan Kerangka Pemikiran Penelitian, yaitu:

(Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022)



3. Objek dan Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme.

Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (*reciprocal*).

Dalam metode kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang sedang diteliti, maka teknik pengumpulan datanya bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau simultan.

Analisis data yang dilakukan pada metode kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Maka, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna.

Pada penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melihat optimalisasi tata kelola pemerintahan di kecamatan lembang dengan menilai berdasarkan prasyarat atau kriteria dan parameter tata kelola

pemerintahan. Pada akhirnya, hasil dari penelitian didapatkan prasyarat mana yang sudah dipenuhi dan mana yang belum untuk menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholders* (pemangku kebijakan) terkait.

Sesuai dengan rumusan persoalan dan sasaran penelitian, maka langkah pertama yang perlu untuk dilakukan adalah:

- 1) Mengidentifikasi kebijakan perencanaan di Kota Lembang. Identifikasi kebijakan perencanaan secara hierarki dari pusat sampai daerah mengenai tata kelola pemerintahan Kecamatan Lembang diperlukan untuk dapat diketahui dukungan kebijakan mengenai pemekaran wilayah tersebut. Analisis kebijakan dilakukan sebagai bahan pertimbangan terhadap kesiapan pemekaran wilayah Perkotaan Lembang dari sisi kebijakan publik.
- 2) Identifikasi tata kelola pemerintahan Kecamatan Lembang berdasarkan kriteria-kriteria pemekaran wilayah. Identifikasi kesiapan Perkotaan Lembang dilakukan melalui analisis evaluasi formal mengenai prasyarat atau kriteria-kriteria dan parameter pemekaran wilayah yang dibandingkan dengan kondisi nyata di Perkotaan Lembang. Penilaian terhadap kriteria pemekaran kesiapan yang sudah dipenuhi dan mana yang belum menjadi penting. *Content analysis* atau analisis isi

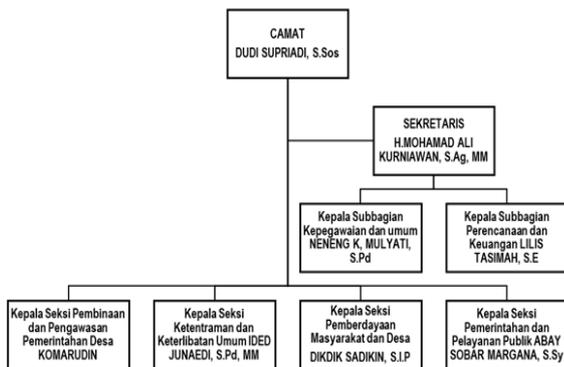
dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap prasyarat pemekaran wilayah. Analisis isi adalah sebuah teknik analisis untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memerhatikan konteksnya.

- 3) mengidentifikasi tata kelola yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah dan isu serta mengembangkan potensi kewilayahan yang ada di kecamatan lembang. Identifikasi tata kelola di Kecamatan Lembang dilakukan dengan menganalisis masalah dan isu yang ada sesuai dengan fakta menggunakan hasil wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan berdasarkan kriteria tata kelola pemerintahan. Sehingga analisis ini dapat melihat sejauh mana pengembangan potensi wilayah di Kecamatan Lembang sendiri.

Tujuan analisis isi adalah untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, *reliable* dan dapat direplikasi. Oleh karena itu, bagi analisis isi kuantitatif, Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data, sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.

Secara keseluruhan, pada penelitian ini, prasyarat atau kriteria pemekaran wilayah yang terdiri atas persyaratan dasar

kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah menjadi variabel pengukuran sejauh mana Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Lembang. Setelah diidentifikasi prasyarat atau kriteria pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai literatur lainnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi kebijakan perencanaan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Lembang. Setelah itu, dilanjutkan identifikasi kesiapan dengan melakukan evaluasi formal antara prasyarat atau kriteria pemekaran wilayah dengan kondisi eksisting yang ada di Perkotaan Lembang. Berikut ini merupakan struktur birokrasi kecamatan lembang, yaitu:



(Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, Kecamatan Lembang)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Potensi dan Masalah di Kecamatan Lembang

Secara faktanya Kecamatan lembang termasuk kedalam daerah kawasan agropolitan dan juga urban tourism karena memiliki potensi mengembangkan perekonomian lokal yang dapat membantu PAD Kabupaten Bandung Barat. Potensi – potensi tersebut seperti pertanian, perkebunan, peternakan serta pariwisata baik itu wisata alam maupun buatan. Kecamatan Lembang memiliki sektor pertanian yang cukup tinggi khususnya dalam komoditas sayuran, dimana hasil produksi sayuran di Kecamatan Lembang sudah di Ekspor kebeberapa negara dan 70% menumpang ritel-ritel Jakarta, pertanian tersebut tersebar di hampir seluruh Desa Kecamatan Lembang. . Berikut ini merupakan data produksi tanaman sayuran (per ton) rata rata tahun 2016-2021 :

Jenis Tanaman	2016-2021
Bawang Daun	18848
Bawang Merah	1054
Bayam	4112
Buncis	56081
Cabai Besar	60668
Cabai Rawit	50311
Kacang Panjang	16658
Kangkung	23625
Kembang Kol	10561
Kentang	20561
Ketimun	39232
Kubis	34470
Labu Siam	211350
Terong	24385
Tomat	85772
Wortel	22725

Sumber : Kecamatan Lembang Dalam Angka 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa produksi tanaman sayuran di Kecamatan Lembang cukup besar hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan alam yang mendukung dan juga produksi tanaman sayuran yang cocok sehingga sayuran di Kecamatan Lembang dapat tumbuh dengan baik dan segar. Ekspor sayuran ini meluas di beberapa desa Kecamatan Lembang.

Untuk peternakan di Kecamatan Lembang khususnya desa Kayuambon sendiri sudah terkenal dengan Sapi Perah dan Sapi Potongnya yang dimana Balai Inseminasi Buatan (BIB) diberi mandat pemerintah untuk memproduksi semen beku ternak sapi perah dan potong dalam rangka memenuhi semen beku untuk Inseminasi Buatan (IB) dengan keberadaan tersebut indonesia telah mampu memenuhi sebagian kebutuhan semen beku

sapi secara mandiri. Sebagai pelengkap data tentang Inseminasi Buatan dapat terlihat melalui gambar, yaitu Gambar 2. Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang :



(Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022)

Tidak hanya Pertanian dan Peternakan, Kecamatan Lembang juga memiliki potensi dalam hal pariwisata yang banyak menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Pariwisata di Kecamatan Lembang di dominasi oleh wisata alam yang beragam serta memiliki wisata buatan yang sangat menarik.

Ada Objek wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah ada pula yang masih dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Berikut ini merupakan Table Data Objek Wisata di Kecamatan Lembang :

No	Desa	Objek Wisata	Kawasan Wisata
1	Gunung Kaburaman	Farm House, The Great Asia Adika, Coloursbox Lembang	-
2	Wanang Sari	-	-
3	Pager Wanas	Dago Dream Park, Dago Bakery, Lembang Anteng	Saraca Hills
4	Mekar Wanas	-	-
5	Lampem Sari	Maribaya Natural Hot Spring Resort, Bahari Utama Begonia Glory	-
6	Kayu Ambon	The Ranch	-
7	Lembang	Floating Market	-
8	Cikahuripan	Observatorium Biocoba Cikahuripan Dutch	-
9	Sukajaya	Saraca	-
9	Sukajaya	Lembang Park & Zoo	-
10	Sukajaya	Lembang Wonderland, Lembang Hills	Lintas buatan indah sapi
11	Cibogo	Tara Strawberry Lembang	-
12	Cikole	Orchid Forest, ZombiKlub Parahu	Cikole Jaya Gizi Resort And Adventure
13	Cikidang	Wisata Batu Belau	-
14	Wangmabaja	Giri Mungga	-
15	Cikodea	The Lodge Maribaya, Hutan Mangala, Rumah Bahanda, Pura Hill	-
16	Suteuaya	Busur Pasir Angling, Cenang Lulus Waterfall	-

(Sumber : Hasil Analisis, 2023)

Permasalahan di Kecamatan Lembang yang sangat amat umum yaitu mengenai Rawan Bencana. Lembang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk pada jalur sesar lembang yang dimulai dari kecamatan padalarang hingga jatiningor yang memiliki jarak sekitar 29 KM. jika dilihat dari kondisi tanah di kecamatan lembang memiliki tanah yang gembur sehingga banyak mengakibatkan longsor dikarenakan ketidak stabilan lereng, untuk mengurangi hal tersebut maka

No	Kecamatan	Desa	Kelas Indeks Bahaya		
			Gerakan Tanah	Gempa Bumi	Gunung Api
1	Lembang	Lembang	Sedang	Sedang	Rendah
2		Pagerwangi	Tinggi	Sedang	Rendah
3		Kayuambon	Sedang	Sedang	Rendah
4		Gudang	Sedang	Sedang	Rendah
5		Kahuripan	Sedang	Sedang	Rendah
		Langensari	Tinggi	Sedang	Rendah

(Sumber: Peta Geologi dan Tata Lingkungan dan Hasil Analisis, 2022)

diberlakukannya reboisasi atau penanaman kembali pohon dan tidak lagi mengalih fungsi lahan sembarangan. Adapun beberapa desa yang berada di garis patahan lembang, dapat dilihat melalui table berikut ini :

Lembang merupakan sebuah pusat pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan hal ini membuat kondisi jalan di beberapa titik kecamatan lembang sering mengalami kemacetan. Titik kemacetan yang sering terjadi yaitu di jalan Kolonel Matsuri, Jalan Raya Lembang, Maribaya, Tangkuban Perahu dan Kayu Ambon. Selain kemacetan tersebut Jalan di beberapa desa menuju kota masih

kurang baik . kemacetan di pusat kota banyak diakibatkan oleh kendaraan yang parkir sembarangan, banyak angkutan umum yang parkir di bahu jalan dan kendaraan-kendaraan lain yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Toko perdagangan yang ada di pusat kota sangat minim memiliki ruang parkir sehingga bahu jalan digunakan untuk parkir dan membuat ruang jalan menjadi minim dan mengakibatkan kemacetan. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui gambar, yaitu:

Gambar 3. Parkir Kendaraan yang menggunakan sebagian badan jalan di Kawasan Pertokoan/Perniagaan di Lembang :



(Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2022)

Di kecamatan lembang sendiri sarana persampahan pembuangannya masih sembarangan dikarenakan belum adanya tempat pusat pembuangan sampah, dan masyarakat di kecamatan lembang melakukan pembuangan sampah secara liar di beberapa tempat terutama di kawasan dekat pasar panorama atau bisa dibilang pasar terbesar di kecamatan lembang yang mengakibatkan

sampah menumpuk, yang akan menjadi penyakit untuk sekitarnya.

Persampahan di kecamatan lembang ini masih bergabung dengan perusahaan daerah KBB tetapi tidak semua dilayani oleh perusahaan tersebut karena kendaraan operasionalnya yang terbatas tidak dapat menampung semua persampahan di kecamatan lembang. Baru ada beberapa yang memiliki semi TPA contohnya yaitu desa cibodas. Di kecamatan lembang sendiri masih kurang dalam pengelolaan persampahan.

4.2 Tata Kelola yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah dan isu serta mengembangkan potensi kewilayahan di Kecamatan Lembang

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi permasalahan di kecamatan lembang tentunya dinas dan beberapa stakeholder terkait mencari solusi untuk dapat mengurai beberapa masalah yang ada di kecamatan lembang. Sampai saat ini kemacetan masih terjadi di sejumlah ruas jalan di Kecamatan lembang, kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik ruas jalan menuju sejumlah objek wisata Lembang. Kemacetan terparah berada di Jalan Gudang Kahuripan, karena di titik ini ada dua objek wisata, masing masing Farm House dan The Great Asia Afria.

Lokasi kedua objek wisata ini berada di jantung kawasan Lembang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bandung Barat untuk mengurai titik kepadatan, personel Satlantas Polres cimahi memberlakukan sistem buka tutup maupun one way, dengan mendahulukan kendaraan menuju arah lembang secara bergiliran. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah diterapkan sejumlah skema lalu lintas, termasuk pemantauan menggunakan CCTV untuk memantau titik potensi kemacetan di Kecamatan Lembang, Unit Reaksi Cepat (URC) disiapkan di beberapa titik di Bandung Barat. Jika suatu waktu dalam pemantauan CCTV ada kemacetan, maka akan diterjunkan team URC untuk membantu mengurai kemacetan. Upaya lainnya adalah pihak Dinas Perhubungan akan menyiapkan Posko Statis (Poskotis) di Titik kemacetan.

Adanya kegiatan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara mengakibatkan volume kendaraan yang naik sedangkan ketersediaan lahan parkir yang kurang memadai disetiap kawasan pariwisata kecamatan lembang. Hal ini mengakibatkan kemacetan karena banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan, upaya yang dilakukan dalam hal ini pengelola objek wisata perlu untuk memperluas lahan parkir guna meminimalisir

kegiatan pariwisata yang menyebabkan kemacetan dikarenakan parkir dibahu jalan.

Sesar Lembang atau Patahan Lembang merupakan sebuah sesar yang membentang sepanjang 29 kilometer mulai dari Ngamprah Padalarang Kabupaten Bandung Barat hingga Palintang Pasirwangi Ujung Berung Kota Bandung. Hingga saat ini memang tercatat bahwa Sesar Lembang mengalami gempa terakhir pada abad ke-15 atau sekitar 500 tahun yang lalu, Namun bukan berarti sesar ini tidak aktif berdasarkan hasil penelitian ilmuwan dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Sesar Lembang selalu bergerak sebanyak 3 mm tinggal 5 mm setiap tahunnya, angka ini termasuk ke dalam kategori pergerakan kecil. Dengan banyaknya potensi Gempa bumi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sudah sepatutnya pemerintah gencar melakukan edukasi mitigasi bencana.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Respati Wikantiyoso melalui Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, bahwa Upaya mitigasi bencana di perkotaan harus dilakukan, belajar dari "pengalaman" atas kejadian bencana di kota-kota kita (Aceh, Yogyakarta, Tasikmalaya, Padang dll). Korban jiwa terbesar kejadian bencana gempa bumi di perkotaan diakibatkan oleh terjadinya "keruntuhan" bangunan, terbatasnya akses dan ruang evakuasi di perkotaan, dan/atau kebakaran pasca gempa.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya secara berkala melakukan program kesadaran mitigasi bencana kepada masyarakat, termasuk di sektor Sekolah/Madrasah. Peningkatan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana bertujuan untuk meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi, hal ini juga diperlukan sebagai pedoman pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana yang terjadi.

Dengan potensi gempa bumi yang bisa terjadi, peranan pemerintah dan juga partisipasi masyarakat akan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan meminimalisir korban jiwa dapat mengurangi dampak yang terjadi dari bencana itu sendiri. Berbagai tantangan dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mitigasi kebencanaan, namun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimis kesadaran mitigasi resiko bencana masyarakat kota Cimahi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

4.3 Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lembang

Optimalisasi tata Kelola pemerintahan di kecamatan lembang yaitu mengenai sosialisasi tentang mitigasi bencana di Kecamatan Lembang, Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Esensi edukasi mitigasi bencana adalah gerakan penyadaran, pemahaman, dan peningkatan partisipasi publik (masyarakat) di Kecamatan Lembang dalam memahami potensi rawan bencana alam gempa bumi dan tanah longsor sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kolektif, deteksi dini, strategi dan aksi antisipasif bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan lembang yang rawan bencana agar selamat dan tidak menjadi korban.

Adanya samsat outlet atau samsat keliling di Kecamatan Lembang, Bentuk Layanan ini adalah pengurusan perpanjangan STNK dan Surat izin Mengemudi (SIM) langsung di Kantor Kecamatan Lembang. Diharapkan mampu memudahkan masyarakat Lembang dalam pengurusan STNK dan Sim dan tentu saja sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat untuk taat aturan dalam berkendara dengan melengkapi surat kendaraannya,

dengan adanya layanan ini dihadirkan juga dan pemerintah kecamatan Lembang mengklaim dapat mengurangi biaya masyarakat terutama transportasi karena mengingat Kecamatan Lembang adalah salah satu Kecamatan yang berada cukup jauh dari Pusat Kota dan sebagian besar masyarakat bermukim di daerah pegunungan dengan akses jalan yang kurang memadai.

Peran pemerintah dalam optimalisasi tata Kelola pemerintahan di sektor pariwisata, Peran pemerintah kabupaten bandung barat dalam mengembangkan dan mengelolah sektor pariwisata di kecamatan lembang adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain untuk menarik para wisatawan agar berwisata di kecamatan Lembang. Berikut ini table tentang upaya optimalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Lembang yaitu:

No	Upaya yang sudah dilakukan	Kriteria Good Governance yang sudah dilakukan	Upaya yang dapat dilakukan (jurnal)	Rekomendasi Optimalisasi yang dapat dilakukan
1.	Tertlibt aktif dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Lembang yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata. Memberikan kontribusi secara terbatas berupa kegiatan pemertanian	Partisipasi	Memperbaiki Akses, Infrastruktur dan Fasilitas. Tidak ada sektor pariwisata yang sukses tanpa dijangkau infrastruktur memadai.	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Lembang dapat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, pemetaan rencana, pengembangan sampai dengan pengawasan dan pengendalian, dan pemantauan hasilnya
2.	Sebelum berbagai program di Kecamatan Lembang dilaksanakan atau diwujudkan, Kecamatan Lembang mengundang seluruh elemen masyarakat untuk mengontribusi secara utuh. Sehingga program-program yang sudah direncanakan akan berjalan baik pada saat dilaksanakan di lapangan.	Transparansi	Kondisi dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.	dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi melalui web Kecamatan Lembang atau media sosial yang update, sehingga seluruh Pemangka Kepentingan dan masyarakat dapat mampu memahami kinerja dan tindakan.
3.		Akuntabel		
4.	Adanya smart outlet atau smart kiosk di Kecamatan Lembang. Biosk. Layanan ini adalah pengurusan perpanjangan STNK dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) langsung di Kantor Kecamatan Lembang. Diharapkan mampu memudahkan masyarakat Lembang dalam pengurusan STNK dan Sim secara efektif dan efisien.	Efektif dan efisien	Pelayanan Publik di Kecamatan Lembang dianggap efektif jika masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang mudah dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, cepat, tepat dan memuaskan. Kemampuan pemerintah Kecamatan Lembang untuk meningkatkan efektivitas dari pelayanan publik ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin negawalnya.	pelayanan di Kecamatan Lembang akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang cepat bagi masyarakat sebagai pengguna jasa.
5.		Kepastian hukum		
6.	Masyarakat Kecamatan Lembang dapat mengubuhangi media sosial Instagram Kecamatan Lembang, dalam layanan pengaduan masyarakat dan akan ditindaklanjuti secara cepat oleh tim terkait.	Responsif	Pemerintah Kecamatan Lembang harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus menanggapi keluhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan mengantisipasi keluhan masyarakat.	pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan masyarakatnya secara proaktif. Pemerintah Kecamatan Lembang harus mampu untuk melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan responsif terhadap masyarakat.
7.		Keterbacaan		
8.		Selaras dan sekoherif		

(Sumber Hasil Olahan Data Penelitian, 2022)

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Kecamatan lembang termasuk ke daerah kawasan agropolitan dan juga urban tourism karena berpotensi mengembangkan perekonomian local yang dapat membantu PAD Kabupaten Bandung Barat. Potensi – potensi tersebut meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta wisata baik itu wisata alam maupun buatan.

Kecamatan Lembang perlu lebih dikembangkan potensi – potensinya agar terus berkembang dan tidak berkurang karena Kecamatan lembang termasuk kecamatan yang cukup berkembang dengan pesat di Kabupaten Bandung Barat. Daya dukung lahan seluruh desa di Kecamatan Lembang dengan persentase 83,61. Sektor pertanian di Kecamatan Lembang cukup tinggi.

Terdapat beberapa supplier pertanian dan perkebunan ke luar kota hingga mancanegara. Terdapat wisata yang menarik wisatawan luar Negara. Sedangkan masalah Kecamatan Lembang yang sangat amat umum yaitu sesar lembang Karena lembang termasuk salah satu kecamatan yang termasuk pada jalur sesar lembang yang dimulai dari kecamatan padalarang hingga jatinangor yang memiliki jarak sekitar 29 KM, serta permasalahan yang terus terjadi di kecamatan Lembang yaitu longsor dikarenakan ketidak stabilan lereng, untuk mengurangi hal tersebut maka

pemerintah kabupaten bandung barat dan dibantu masyarakat kecamatan lembang melakukan upaya reboisasi atau penanaman kembali pohon dan tidak lagi mengalih fungsi lahan sembarangan. Kondisi jalan di beberapa desa menuju kota masih kurang baik. Terdapat desa yang belum mendapatkan listrik secara merata. belum terdapatnya pembuangan sampah terbesar atau TPA dan TPS di Kecamatan Lembang tersebut.

Kondisi masyarakat di kecamatan lembang mayoritas mata pencaharian cenderung homogen dinominasi oleh petani, sebagai buruh tani, pedagang dan pekerja bangunan, rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya, interaksi sosial yang kuat yang dicerminkan dalam sikap gotong royong, saling membantu, sikap sopan santun, sikap musyawarah, proses sosialisasi yang terjadi pada masyarakat yang ada di kecamatan lembang yang biasanya di setiap desa mempunyai karang tarunanya sendiri, terutama karang taruna yang berada di desa kayu ambon mereka pernah mendapatkan beberapa pelatihan di tingkat provinsi jawa barat bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari tingkat kabupaten dan mendapatkan pelatihan dari Departemen sosial budaya yang sering kali dilakukan di kecamatan lembang biasanya seperti reog, jaipongan, dan organ tunggal, sebagai tokoh seninya biasanya kepala desanya.

Aktualisasi kesenian di kecamatan lembang dimunculkan melalui kesenian di acara-acara hajatan ataupun acara lainnya. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Contohnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang yang bernama bumdes abadi jaya. BUMDes abadi jaya menghasilkan produk-produk olahan seperti media tanam bibit OBOR dengan bahan dasar pembuatannya berasal dari pengolahan limbah peternakan yang ada di desa sukajaya.

5.2 Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pihak-pihak yang terkait lebih mengoptimalkan kembali lahan parkir terutama di wilayah atau kawasan yang memiliki potensi wisata skala daerah (local), nasional dan internasional, agar potensi wilayah tersebut dapat memiliki kesinambungan atau keberlanjutan dengan berbagai sektor lainnya.
2. Potensi kawasan Lembang tidak hanya dari sektor pariwisata, akan tetapi terdapat banyak potensi lainnya yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah setempat yaitu memberikan optimalisasi kepada sektor-sektor tersebut agar potensi yang lainnya dapat maksimal karena berkorelasi dengan pendapatan asli daerah, pemberdayaan masyarakat, memajukan ekonomi rakyat, serta meningkatkan kualitas hasil dan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bermitra atau bekerja sama dengan pemilik atau para pelaku industri pariwisata, ritel (took modern), dan kawasan-kawasan startegi ekonomi yang digagas dan di kelola oleh pemerintah daerah.

3. Dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan yaitu melalui pelayanan publik yang dilakukan dengan maksimal agar pihak masyarakat/publik sebagai penerima pelayanan tersebut dapat memperoleh pelayanan publik dengan maksimal. Unutk menunjang hal tersebut rekomendasi untuk pemerintah daerah, menempatkan lokasi pelayanan publik yang aksesnya dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat mengingat lokasi lembang yang berbukit atau kawasan pegunungan misalnya dengan adanya pelayanan publik yang modelnya jemput bola, seperti adanya mobil keliling khusus pelayanan publik yang digagas oleh pemerintah daerah.

Untuk selanjutnya adanya rekomendasi untuk pemerintah daerah yaitu adanya program pemerintah melalui gerakan penyadaran, pemahaman, dan peningkatan partisipasi publik (masyarakat) di Kecamatan Lembang dalam memahami potensi rawan bencana alam gempa bumi dan tanah longsor sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kolektif, deteksi dini, strategi dan aksi antisipasif bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan lembang yang rawan bencana agar selamat dan tidak menjadi korban.

Daftar Pustaka

- Achmad, Daniri. 2006. Konsep dan penerapan Good Corporate Governance dalam konteks Indonesia. Ray Indonesia. Jakarta.
- Argama, Rizki. 2005 "Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah Di Indonesia." *Fakultas Hukum*.
- Creswell, JW. 2003 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dwiyanto, Agus dan Bevaola Kumsumasari. 2001. Budaya Paternalisme dalam birokrasi pelayanan public. Policy Brief No.2/PB/2001, Yogyakarta PSKK UGM.
- Eriyanto, 2011 Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, hal. 26
- Fauzy Rizal, 2011 "Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak", Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, h. 2.
- Gunarsih, Tri. 2003. "Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance." *Kompak* Nomor 8.
- Hajar¹, Siti, Khaidir Ali, and Agung Saputra. "Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6.1 (2021): 136-142.
- Hartnett, D., 2008. *The link between taxation and corporate governance*. In *Tax and corporate governance* (pp. 3-8). Springer Berlin Heidelberg.
- Kadarisman, Ade, and Ilham Gemiharto. "TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI INDONESIA (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi*

- Government dalam Demokrasi* 5.1 (2017).
- Kustiwan, Iwan, and Afrizal Ramadhan. "Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 3.1 (2019): 64-84.
- Krippendorff, Klaus, 1991. *Content Analysis: an introduction on its Methodology*, London: SAGE Publications.
- Krisyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Mudrajad Kuncoro, 2004 *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, h. 4.
- Muqoyyidin, 2016 Andik Wahyun. "Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 10.2:287-310.
- Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. 2021. Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263-269.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. *INOVASI*, 13(2), 78–89.
- Respati Wikantiyoso, 2005. *Paradigma Perencanaan dan Perancangan Kota*, Malang: GKAK, jurusan Arsitektur Unmer Malang ISBN: 979-9488-07-9.
- Sahya Anggara. 2012, *ILMU ADMINISTRASI NEGARA (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10*.
- Sulila, I. 2015. *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Deepublish.

- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Snyder, J. C., & Catanese, A. J. (Eds.). 1988. Urban Planning. McGraw-Hill.
- Syaukani; Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, 2002 Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 274.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak (Ed.), 2008, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, h. 138.
- Utoyo, Bambang. "Analisis kebijakan prinsip governance dan aktor melalui analytical hierarchy process (AHP) dalam perencanaan kota." *Spirit Publik* 12.1 (2017): 45-56.
- Wibawa, Samodra. 2001. Negara-Negara di Nusantara: dari Negara-Kota hingga Negara-Bangsa, dari Modernisasi hingga Reformasi Adminitrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wikantiyoso, R, 2010. Mitigasi Bencana Di Perkotaan; Adaptasi Atau Antisipasi Perencanaan Dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana). *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2(1), 18-29.
- Van Dijk, Maine. 2006, *Managing Cities in Developing Countries: The Theory and Practice of Urban Management*, Edward Elgar Publisihing.
- Peraturan :**
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.
- Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

PP No.78 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 8 berbunyi bahwa pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

PP No 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Surat bernomor 001/IST-KPBU/II-K/2022 oleh Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU (Kawasan Bandung Utara) yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat (Tim Inisiator Komite Pemekaran KBU, 2022).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029 menjelaskan fungsi kecamatan Lembang sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yang diperuntukan untuk pengembangan pusat pelayanan beberapa kecamatan, sebagai Kawasan budaya, wisata, perekonomian skala lokal, Pendidikan, Kesehatan dan peribadatan.